

Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

M. Yusuf Agung Subekti¹, Moh. Mansur Fauzi²

¹ STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

² STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

*E-mail: mansur@staima-alhikam.ac.id

Abstrak

Program pemberdayaan terhadap masyarakat sangat penting dalam rangka menunjukkan bahwa pondok pesantren terutama pesantren *salaf* tidak hanya mampu berperan dalam bidang keagamaan namun juga mampu berperan dalam pemberdayaan pada masyarakat sekitar baik dibidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Peran pondok pesantren dalam bentuk pemberdayaan masyarakat secara substansinya jelas mengarah kepada sarana terjalannya komunikasi antara pesantren dengan masyarakat sekitar. Sehingga dengan hal tersebut dapat saling memberikan kemajuan dan pengalaman antara satu dengan yang lain, bukan saja dalam bidang pendidikan tapi dalam berbagai bidang yang menjadi tuntunan pesantren harapan masa depan. Secara umum, fisik bangunan dan *output* yang dihasilkan bisa berorientasi ke arah yang lebih maju, namun satu hal yang perlu disoroti adalah peran pesantren secara optimal dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah *urgent*, guna terwujudnya pesantren yang bermutu Pondok Pesantren Nurul Qodim, melakukan pemberdayaan dalam bidang Pendidikan yaitu dengan mewujudkan peranannya pada masyarakat sekitar dengan mendirikan 15 Madrasah Diniyah Cabang. Bidang Sosial yaitu dengan membangun masjid sebanyak 48 di kecamatan Paiton dan pembangunan jembatan, dan penghijauan dengan menanam 1000 pohon kelapa. Bidang Dakwah Islamiyah yaitu shalawatan "*Syubbanul Muslimin*", Sarwaan, Majelis Ta'lim *al-Mar'atus Shalihah*, dan JTI (*Jam'iyah Taqarrub Ilallah*). Sedangkan Modelnya menggunakan *Metode Partisipatory Assesment* (MPA) dan Model relasi dalam kegiatan pemberdayaan menggunakan hubungan "*induk semang-klien*".

Kata kunci: pemberdayaan, pesantren, salaf.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia sebenarnya mempunyai peluang dalam menciptakan SDM yang berkualitas dengan catatan pondok pesantren mampu beradaptasi dengan globalisasi yang sedang terjadi dengan tanpa meninggalkan watak kepesantrenannya. Menurut Edy Supriyono, minimal ada tiga alasan mengapa pesantren peluangnya lebih besar dibandingkan lembaga pendidikan yang lain.

Pertama, pesantren yang ditempati generasi bangsa (mulai anak-anak hingga pemuda), dengan pendidikan yang tidak terbatas oleh waktu sebagaimana pendidikan umum. *Kedua*, pendidikan pesantren yang mencoba memberikan keseimbangan antara pemenuhan lahir dan batin, *Ketiga*, paparan Nur Cholish Madjid yang memberikan contoh masyarakat yang terkena "dislokasi", yaitu kaum marginal atau pinggiran di kota-kota besar, seharusnya menyadarkan pesantren. (Edy Supriyono, 2003: 62-63)

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan telah memberikan warna dan corak khas dalam masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan. Pesantren tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sejak berabad-abad. Oleh karena itu, secara kultural lembaga ini telah diterima dan telah ikut serta membentuk dan memberikan corak serta nilai kehidupan kepada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kyai, santri serta seluruh perangkat fisik dari sebuah pesantren membentuk sebuah kultur yang bersifat keagamaan yang mengatur perilaku seseorang, pola hubungan dengan warga masyarakat. Dalam keadaan demikian, produk pesantren lebih berfungsi sebagai faktor integratif pada masyarakat dalam upaya menuju perkembangan pesantren (Dhofier, 1984: 18).

Pondok pesantren sebagai suatu tipologi yang unik dari institusi pendidikan, yang telah

berusia ratusan tahun, sekitar tiga abad silam. Asal muasal lahirnya pesantren sebagai lembaga pendidikan yang penting di masyarakat berlangsung dengan cara sederhana dan simpel sehingga julukan tradisional pada pesantren sebenarnya lebih merupakan bentuk penyederhanaan dari masalah yang belum tuntas. Pesantren bukan sesuatu yang sangat substantif terlebih jika dikontraskan dengan modernitas atau rasionalitas, pasti akan semakin tidak jelas dan buram. Sebab fenomena yang tampak akhir-akhir ini justru nilai-nilai substantif dari pesantren banyak yang diterapkan oleh berbagai institusi pendidikan guna menggalang terciptanya sumber daya manusia yang handal. Sejarah juga mencatat bahwa pesantren adalah benteng pertahanan terakhir dari negara kesatuan Republik Indonesia atau umat Islam di negeri ini. Berdirinya Republik Indonesia ini, tidak terlepas dari jasa para ulama, alumnus pesantren, begitu pula dengan lenyapnya komunis serta gerakan pengacau keamanan. Bagi umat Islam, melalui pesantren-lah mereka berharap kontinuitas estafet dakwah Islamiyah terus berlanjut. Hilangnya peran pesantren berarti akan lenyap pula para ulama, serta orang-orang yang saleh dan kalau sudah demikian maka tinggal tunggu sirnanya agama tersebut (Siraj, 1998: 23).

Menurut A. Malik Fadjar, kelebihan pondok pesantren dapat dilihat dari polemik kebudayaan yang berlangsung pada tahun 1930-an. Dr. Sutomo, salah seorang cendekiawan yang terlibat dalam polemik tersebut, menganjurkan agar asas-asas sistem pendidikan pesantren digunakan sebagai dasar pembangunan pendidikan nasional (http://www.gurutrenggalek.com/2010/09/relevansi-sistem-pendidikan-pesantren_19.html). Walaupun pemikiran Dr. Sutomo itu kurang mendapat tanggapan yang berarti, tetapi patut digaris bawahi bahwa pesantren telah dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan identitas budaya bangsa Indonesia. Sekarang ini, umat Islam sendiri tampaknya telah menganggap pesantren sebagai model institusi pendidikan yang memiliki keunggulan, baik dari sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam maupun dari aspek tradisi keilmuan yang oleh Martin Van Bruinessen dinilainya sebagai salah satu tradisi agung (*great tradition*). (Bruinessen, 1999: 17)

Dalam konteks kekinian, pesantren dalam perkembangannya terlihat memasuki babak baru di tengah-tengah dinamika sosio-kultural masyarakat Indonesia. Hal itu, paling tidak dibuktikan dengan beberapa fenomena sosial yang memperlihatkan menguatnya kembali posisi pesantren secara fungsional dalam mewarnai, untuk tidak mengatakan membentuk, kebudayaan masyarakat Indonesia (Bawani, 2011: 57).

Kaitannya dengan konteks sosial ekonomi, keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat semakin menunjukkan nilai signifikansinya, di antaranya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dapat menampung aspirasi kalangan yang terdorong dari pergulatan ekonomi atau kalangan yang terdorong ke pinggir dari jalur-jalur untuk mengakses sumber ekonomi. Dalam kapasitasnya yang demikian itu, pesantren sangat potensial untuk menjadi *katalisator* dari kesenjangan sosio-ekonomi (Bawani, 2011: 57).

Dalam interaksinya dengan kekuasaan, pesantren secara sosiologis memainkan peran sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan yang dianggap menyimpang dalam arti seluas-luasnya, terutama berkaitan dengan menjalankan amanat dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial (Bawani, 2011: 58).

Akan tetapi di samping hal-hal yang mengembirakan tersebut di atas, perlu pula dikemukakan beberapa tantangan pondok pesantren dewasa ini. Tantangan yang dialami lembaga ini menurut pengamatan para ahli semakin lama semakin banyak, kompleks, dan mendesak. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Ditengah derap kemajuan ilmu dan teknologi yang menjadi motor bergeraknya modernisasi, dewasa ini banyak pihak merasa ragu terhadap eksistensi lembaga pendidikan pesantren. Keraguan itu dilatar belakangi oleh kecenderungan dari pesantren untuk bersikap menutup diri terhadap perubahan di sekelilingnya dan sikap kolot dalam merespon upaya modernisasi. Menurut Azyumardi Azra, kekolotan pesantren dalam mentransfer hal-hal yang berbau modern itu merupakan sisa-sisa dari respon pesantren terhadap kolonial Belanda. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang bersifat modern, yang

selalu mereka anggap datang dari Barat, berkaitan dengan penyimpangan terhadap agama (Madjid, 1997: xvi).

Sungguhpun demikian, pesantren tak dapat berbangga hati dan puas dengan sekedar mampu bertahan atau terhadap sumbangan di masa lalu. Signifikansi pesantren bukan hanya terletak pada dua hal tersebut, tapi pada kontribusinya yang nyata bagi umat Islam secara khusus, dan masyarakat sekitar secara luas, di masa kini dan mendatang. Justru kita kalau mau jujur, ketahanan pesantren ternyata menyimpan berbagai persoalan yang cukup serius. Sebab dalam realitasnya, daya tahan tersebut, pada satu sisi, telah membuat terjadinya pengentalan *romantisme konservatif*, dan pada sisi lain, hal itu telah menyeret pesantren ke dalam perubahan yang sekedar “latah” dan tanpa antisipatif (A'la, 2006: 16).

Tapi tak cukup sampai disini saja, pada masa-masa awal berdirinya pesantren, peran dan kontribusinya tidak lebih hanya pada bidang keagamaan, di mana dakwah dan syi'ar dalam memperluas jaringan Islam, untuk tidak mengatakan islamisasi pendidikan pribumi adalah melalui semangat keagamaan. Lambat laun namun tidak pasti, peran pesantren juga mulai merambah pada sektor yang lebih luas, bidang sosial, ekonomi, maupun membentuk sebuah budaya. Untuk tidak mengatakan sebuah sentimen terhadap pendidikan pesantren saat ini, sebagaimana dikatakan oleh Nurcholis Madjid, bahwa:

dalam “ujian” kemampuan mengadakan responsi pada masalah-masalah perkembangan sosial yang semakin kompleks itu ternyata orang-orang berpendidikan umum tetap lebih “unggul” dan “leading” dari pada mereka yang berpendidikan agama, biarpun “semodern” lulusan *Darul 'Ulum* di Kairo! (Madjid, 1997: 12)

Bilamana pendapat di atas, di kontekskan dengan penelitian penulis pada saat ini, yaitu di Pondok Pesantren Nurul Qodim (selanjutnya di singkat dengan PPNQ), yang pendidikannya hanya di bidang keagamaan, “*mampukah mereka mengambil peran dan memberi kontribusi pada masyarakat sekitarnya?*” Dan juga “*Bisakah tradisi lama berdialog sehat dengan kekinian kita?*” Ini hanya asumsi awal peneliti untuk lebih jauh mendalami penelitian selanjutnya.

Berangkat dari pendapat sementara orang mengenai lembaga pendidikan yang dikenal dengan pondok pesantren tradisional/salaf, maka tulisan ini akan mencoba menguak tentang eksistensi pondok pesantren dengan menampilkan profil sebuah pondok pesantren tradisional yang berada di daerah Jawa Timur, yaitu PPNQ, yang terletak di desa Kalikajar Kulon kecamatan Paiton, sekitar 25 km jalan pantura dari kota Probolinggo. Pesantren ini didirikan pada tahun 1947. Perjalanan selama 65 tahun ini, peneliti tertarik untuk mengangkat peranannya dalam pemberdayaan masyarakat sekitar.

METODE/EKSPERIMEN

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai bentuk studi kasus (*case study*). Menurut Bogdan dan Taylor maksud dari penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001: 3).

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti bertindak sebagai *key instrument* atau alat penelitian yang utama, yang berarti peneliti harus dapat menangkap makna, berinteraksi terhadap nilai-nilai lokal yang mana hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan kuesioner atau yang lainnya. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan (Moleong, 2001: 103).

Sumber data tersebut diperoleh dalam situasi yang wajar (*natural setting*). Sumber data juga dapat dikategorikan menjadi 3P tingkatan dari bahasa Inggris, yakni: *person, place, and paper*.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa prosedur. Sedangkan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu; 1) pengamatan terlibat (*participant observation*), 2) wawancara mendalam (*indepth interview*) dan 3) dokumentasi.

Selanjutnya, menurut Sudarsono analisis data dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu

analisis data selama di lapangan pada saat melakukan observasi, *interview* maupun ketika memperoleh data pada dokumen. Sedangkan tahapan kedua dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul (Sudarsono, 1992: 45).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan PPNQ Bidang Pendidikan

Dari model pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak PPNQ ini, telah memenuhi model-model pemberdayaan yang ada, dimana pihak PPNQ telah melakukan upaya-upaya, yaitu:

Pertama, PPNQ mendelegasikan dan melibatkan peran pengasuh dan asatidz dalam pendidikan ini, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi masalah yang sedang berkembang.

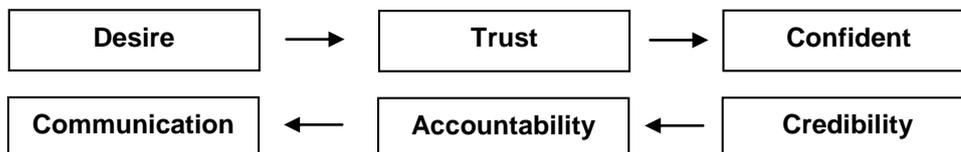
Kedua, PPNQ telah membangun kepercayaan yang sangat kuat diantara para pengasuh madrasah diniyah cabang dan para asatidz yang bertugas mendidik, mereka juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di setiap rapat tiga bulan sekali.

Ketiga, antara pihak PPNQ dengan para pengasuh madrasah diniyah cabang telah memberikan ide dan saran untuk kemajuan madrasah diniyah cabang, hal ini termasuk rasa percaya diantara kedua belah pihak.

Keempat, terjadinya partner dalam bekerja, baik pihak PPNQ dan dewan pengasuh. *Kelima*, memberikan bantuan kepada para pengasuh dalam menjalankan aktivitasnya yang sifatnya adalah non-materill, artinya mereka saling bertukar saran dan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

Keenam, adanya komunikasi yang aktif diantara mereka, sehingga tercipta berupa kesempatan untuk *cross-training*.

Dari paparan enam item sebelumnya, bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PPNQ telah sejalan dengan model pemberdayaan teorinya Sharafat Khan, ia mengatakan bahwa, model pemberdayaan masyarakat guna menjamin keberhasilan, terdiri dari: *desire, trust, confident, credibility, accountability, dan communication*. Bila di gambarkan berbentuk:



Pendidikan dalam konteks transformasi sosial berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan manusia secara utuh dan holistik. Oleh karena berbagai persoalan kemiskinan dan keterbelakangan sebagai akibat dari sistem pendidikan yang ada saat ini. Untuk membantu memberdayakan mereka saat ini, PPNQ melalui kiprahnya dalam bidang pendidikan keagamaan yang ada di beberapa desa saat ini dengan nama "Madrasah Diniyah Cabang". Dengan demikian langkah strategis adalah menciptakan proses belajar yang otonom yang memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi diri mereka sendiri.

Istilah pemberdayaan masyarakat dalam dunia pendidikan pada hakikatnya merupakan pelibatan masyarakat itu sendiri (Maisyaroh, 2003: 122). Itu semua berkenaan dengan kineja *stakeholders*. Dalam paparan data di atas ditemukan bagaimana para pengasuh madrasah diniyah cabang dalam menyiapkan segala kebutuhannya. Tak jarang mereka banyak meluangkan waktunya terhadap eksisnya madrasah diniyah cabang ini dengan semangat perjuangan dan pengabdian kepada sosok/tokoh yang menjadi panutan menjadi sebuah motivasi dalam menjalani rutinitas ini. Kepercayaan pada "barokah" dari seorang guru yang disegani menjadi landasan bagi mereka untuk selalu aktif dalam perjuangan. Sebagaimana perkataan Abdurrahman Wahid; "para santri menerima kepemimpinan kiainya karena mereka mempercayai konsep "barokah" yang berdasarkan pada

“doktrin emanasi” dari para sufi” (Wahid, 2001: 234). Nilai inilah yang dibangun pada setiap pesantren yang membedakan dengan institusi pendidikan pada umumnya.

Sebagaimana perkataan salah satu pengasuh maupun koordinator madrasah diniyah cabang, bahwa banyak anak-anak yang setelah lulus madrasah diniyah ini melanjutkan jenjang pendidikannya dengan mondok di PPNQ dan lebih mendalami pelajaran agama. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu fenomena yang mengherankan karena sebelumnya telah diprediksi oleh seorang filosof dan sekaligus negarawan Perancis, Andre Malaux, pernah meramalkan bahwa:

Tahun dua ribuan ke atas merupakan abad agama. Manusia tidak bakal *survive* ketika itu, apabila nilai-nilai agama tidak diaktualisasikan kembali dalam setiap langkah kehidupan. Dalam banyak kawasan dunia belakangan ini, terlihat jelas bahwa intensitas keberagaman masyarakat semakin tinggi. Gejala tersebut, antara lain merupakan reaksi terhadap paham *materealisme* yang eksklusif dari sebagian besar ideologi sekuler yang bersaing pada abad ke-20 yang lalu. Kecenderungan semacam itu, sekaligus juga merupakan reaksi balik dari berkembangnya *developmentalisme* (Sudjatmoko, 1987: 45), yang ternyata tidak sepenuhnya berhasil membahagiakan umat manusia dalam arti yang luas dan seutuhnya (Bawani, 2011: 289).

Dalam salah satu amanat Kyai Mino yang disampaikan oleh Gus Ubaid bahwa adanya pendidikan ini untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu agar mereka juga bisa menimba ilmu sebagaimana yang lain. Masyarakat sekitar PPNQ mayoritas adalah buruh tani, mereka hanya mendapatkan upah minimum yang hanya habis untuk makan sehari-harinya, belum memenuhi kebutuhan yang lain apalagi dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Sebenarnya dalam masalah pendidikan, bagi masyarakat yang tidak mampu sebenarnya harus ditanggung oleh negara namun realitanya berbeda, kesenjangan pendidikan semakin jauh antara si kaya dengan si miskin. Padahal di negara ini sering terdengar program “*Education For All*” “Ayo Sekolah”, dan sederat program yang lain. sejalan dengan pemikiran di atas, bahwa:

Sedangkan di Indonesia misalnya, permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan, antara si kaya dan si miskin. Hal ini terlihat jelas, bahwa biaya menyekolahkan anak dalam sistem pendidikan formal, bagi orang kaya maupun miskin relatif sama (seperti di sekolah-sekolah negeri). Penyebabnya adalah sekolah-sekolah negeri yang lebih kurang 90% pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah justru banyak diduduki oleh anak-anak orang berada maupun kelas menengah. Di sisi lain, anak-anak dari kelompok masyarakat miskin (yang dikarenakan minimnya potensi akademis) harus rela mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta, yang 90% pembiayaannya dipikul oleh mereka sendiri (Darmaningtyas, 2011: 326).

Amanat yang kedua dari Kyai Mino dengan mendirikan Madrasah Diniyah Cabang ini untuk mengisi kekosongan pendidikan agama. Pelajaran PAI ini dirasakan sangat kurang sekali, sebagaimana dikatakan oleh Ust Suki Riady, sebagai Komite Sekolah, bahwa jam pelajaran agama hanya 1-2 jam setiap minggunya. Oleh karenanya, peran Madrasah Diniyah Cabang ini sangatlah vital dalam tingkat pendidikan dasar dan menengah. Agar generasi kita kedepan mampu menjadi orang yang beriman, bertaqwa dan memiliki akhlak yang mulia. Sehingga berdirinya Madrasah Diniyah Cabang ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Kalau kita kaji secara mendalam, maka kita akan melihat bahwa rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut sebenarnya ada relevansinya dengan pendidikan diniyah ini karena di dalamnya terdapat poin-poin yang sama, yaitu:

1. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbudi pekerti luhur dan berkepribadian
3. Disiplin dan bertanggung jawab
4. Berilmu pengetahuan
5. Sehat jasmani dan rohani

Pemberdayaan dalam bidang pendidikan ini, PPNQ memberikan tanggung jawab dan wewenang seluas-luasnya kepada para pengasuh dan para guru dalam mengelola madrasah diniyah masing-masing, kemudian mengandung penciptaan kondisi saling percaya antara keduanya, serta mengandung adanya *employee involvement* yaitu melibatkan seluruh para guru dan pengasuh dalam pengambilan keputusan. Berkenaan dengan ini, Maisyaroh mengatakan dalam "*Manajemen Pendidikan*", bahwa keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan oleh satuan pendidikan, yang berarti mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan serta evaluasi pendidikan (*monitoring and evaluating*) (Imron, 2003: 112). Kegiatan ini sudah dilakukan antara tiga pihak, yaitu pertemuan oleh para guru/asatidz, para pengasuh madrasah diniyah cabang, dan para pengurus PPNQ, mereka mengagendakan pertemuan untuk membicarakan kemajuan maupun kekurangan madrasah diniyah cabang dalam setiap tiga bulan sekali.

Hal ini membutuhkan komitmen oleh beberapa pihak karena merupakan suatu proses yang tidak mudah digapai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ricard A. Gorton, bahwa pelibatan masyarakat yang efektif merupakan tujuan yang tidak mudah dicapai (Gorton, 1977: 362). Pemberian pengetahuan dalam bentuk pengarahan-pengarahan, pelatihan-pelatihan serta usaha memfasilitasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam wadah organisasi akan berdampak positif bagi lembaga. Darinya akan muncul respon-respon, serta dukungan-dukungan yang positif pula dari masyarakat terhadap lembaga. Pada tahapan selanjutnya terjadi komunikasi, terserapnya aspirasi dan muncullah persamaan persepsi antara kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat menjamin mutu pendidikan atas dasar kesesuaian layanan lembaga dengan kebutuhan masyarakat.

B. Pemberdayaan PPNQ Paiton dalam Bidang Sosial

Dalam model-model pemberdayaan yang telah dilakukan, PPNQ tidak secara khusus menprogramkan dan menjadi tujuan pokok saat ini, sehingga apa yang terjadi dari program yang telah berjalan adalah bentuk partisipasi kepada masyarakat sekitar. PPNQ hanya bertindak sebagai penyelenggara dalam beberapa kegiatan yang terjadi. Artinya pihak PPNQ hanya menjadi partner masyarakat dalam setiap kegiatan sosial ini dilakukan.

PPNQ telah lama melakukan pemberdayaan di bidang sosial ini, seperti yang telah di uraikan dalam bab sebelumnya, bahwa itu merupakan kebutuhan masyarakat. Hal sejalan dengan ungkapan bahwa "Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil (*real-needs*) masyarakat dan bukan hanya sekedar kebutuhan yang dirasakan (*felt-need*). Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku pemberdayaan semestinya mampu mengenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian rupa dengan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat". PPNQ melakukannya dengan membangun beberapa masjid dan jembatan yang merupakan kebutuhan mendesak pada saat itu.

Sejalan dengan pemikiran di atas, bahwa Pesantren dengan karakteristik kemandirian dan independensi kepemimpinannya tetap memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1). Sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transformasi ilmu pengetahuan agama (Islam) dan nilai-nilai ke-islam-an (*Islamic values*), 2). Sebagai lembaga keagamaan yang melakukan control social (*social control*), dan 3). Sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) (Direktorat Pendidikan..., 2004: 8).

Dikuatkan oleh pendapat Qomar, mengemukakan bahwa pesantren terlibat aktif dalam mobilisasi pembangunan masyarakat desa, sehingga komunitas pesantren terlatih melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat yang menyebabkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara santri dan masyarakat, antara kiai dan kepala desa. Ma'sum mengemukakan 3 (tiga) fungsi utama pesantren, yaitu: fungsi religius (*diniyah*), fungsi sosial (*ijtimaiyah*), dan fungsi pendidikan (*tarbawiyah*) (Qomar, 2000: 23).

Fungsi sosial pesantren adalah melakukan upaya-upaya riil dalam kegiatan pemberdayaan untuk mengentaskan masyarakat dari keterpurukan sosial karena banyaknya problematika yang dihadapi. Sedangkan upaya riil PPNQ dalam mencari *problem solving* berangkat dari inisiatif pesantren sendiri setelah melihat dan mendengar keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar pesantren. Kyai, dalam hal mencari *problem solving* masyarakat masih dominan peranannya. Karena masyarakat masih berasumsi bahwa kyai tidak hanya sebagai tokoh agama saja yang mengajarkan ilmu agama pada santri dan masyarakat, namun lebih dari itu, sosok kyai yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan juga mampu mencari jalan keluar problematika masyarakat.

C. Pemberdayaan PPNQ Paiton dalam Bidang Dakwah Islamiyah

Dalam pemberdayaan dalam bidang dakwah Islamiyah ini, PPNQ memiliki beberapa kegiatan keagamaan, sebagaimana paparan dalam bab IV di atas. Yaitu kegiatan *Subbanul Muslimin*, *Sarwaan*, *Majlis Ta'lim al-Mar'atus Shalihah*, dan *JTI (Jam'iyah Taqarrub Ilallah)*. Beragamnya kegiatan mulai dari segmen yang muda, para ibu-ibu, dan juga untuk kalangan umum, menandakan banyaknya problematika kehidupan yang dihadapi masyarakat sekitar saat ini, mulai dari himpitan kemiskinan, kurangnya peluang kerja, pendidikan yang mahal dan sebagainya. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini, paling tidak mereka (masyarakat) mendapatkan pencerahan dan memperoleh pemecahan yang tepat, maka agamalah jawabannya. Karena menurut Abdurrahman Wahid, agama memiliki sasaran ideal bagi kehidupan manusia, sasaran yang mana dibentuk oleh pandangan dunia dan etos pengabdian yang berkembang dalam hidup keagamaan para penganutnya. Keyakinan agama memberikan bekas yang seringkali amat mendalam, sehingga mampu mengontrol dan memberi arah terhadap perilaku seseorang, untuk senantiasa berpegang teguh padanya di tengah kehidupan yang terkadang sulit dan terus mengalami perubahan (Wahid, 1981: 6). Keyakinan agama, pada gilirannya melahirkan institusi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan penganutnya. Lembaga itu menciptakan dalam dirinya mekanisme untuk menangani berbagai masalah kehidupan dari sudut pandang keagamaan, misalnya dengan menyusun program peningkatan kualitas umat dibidang pendidikan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya (Madjid, 1993: 124). Problematika sosial inilah yang menjadi lantaran sebagian masyarakat untuk selalu kembali kepada rutinitas keagamaan dan PPNQ mampu berperan lebih dalam hal ini. Tentunya ini semua bukan sekedar melaksanakan kegiatan tapi ada nilai-nilai yang dibangun, kemurnian dan keikhlasan dalam setiap segmennya.

Jika dihubungkan dengan pemikiran al-Jabiri, sebagaimana terhimpun dalam teori "Post Tradisionalisme Islam", kehadiran dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh PPNQ dapat dijelaskan sebagai wujud pergulatan antara nilai-nilai religius masa lalu yang terwadahi dan dibungkus oleh tradisi keislaman yang dipegang teguh kalangan santri negeri ini di satu pihak, dengan tuntutan hidup masyarakat era modern yang semakin membutuhkan jasa dan sangat dipengaruhi oleh dunia industrialisasi di pihak lain, sebagai upaya mencari dan merumuskan pijakan yang kokoh, guna membangun kehidupan baru, yang diyakini sebagai ideal di masa depan (al-Jabiri, 1999: 195-196). Simpul pemahaman seperti ini, di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan empiris secara cermat di lapangan, kemudian dilakukan refleksi atau perenungan logis dan sistematis, untuk merumuskan makna teoritis yang terkandung di dalamnya.

Jika hendak di tuturkan dalam sebuah alur pikir yang agak rinci, maka fokus permasalahannya tetap saja kembali pada hubungan *Islam* dengan *modernitas*. Dalam kaitan ini, Islam diposisikan sebagai pihak yang tengah menghadapi tantangan mengingat bergulirnya era modern ini, yang terjadi adalah munculnya kesadaran tentang betapa penting program-program (dakwah Islamiyah) tersebut untuk meningkatkan nilai-nilai religiusitas tetapi bersamaan dengan itu, ia tidak rela jika dengan deru era modern ini menimbulkan kehancuran agama dan moral, baik dikalangan mereka yang langsung berperan maupun pada masyarakat sekitar atau bahkan mencakup lingkungan yang lebih luas. Jadi persoalannya adalah bagaimana Islam tetap eksis di tengah derap era modern dan sebaliknya tidak menimbulkan malapetaka dalam hal religiusitas dan moralitas masyarakat, kaum muslimin pada

khususnya.

Dalam perspektif teori “Post Tradisionalisme Islam”, proses industrialisasi yang sedang bergerak cepat sekarang ini, sesungguhnya mengandung dan menimbulkan banyak masalah, disamping segi manfaatnya. Permasalahan itu hanya mungkin di atasi secara tuntas, manakala ada upaya untuk menghadirkan kembali nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu yang benar-benar masih orisinal, belum terkontaminasi oleh dampak negatif industrialisasi sebagaimana yang kini tengah berjalan, sebagai upaya meletakkan dasar berpijak yang kokoh, untuk membangun idealitas masa depan yang lebih baik. Jadi, orisinalitas nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu itu dihadirkan kembali ke panggung sejarah kehidupan masa kini, bukan sekedar dalam fungsinya sebagai alat untuk memberikan kritik terhadap penyimpangan tata kehidupan yang ada karena pengaruh modernitas, melainkan sekaligus juga sebagai peletak pondasi yang kokoh untuk membangun batu loncatan guna merancang idealitas masa depan sesuai apa yang di cita-citakan oleh ajaran Islam (al-Jabiri, 1999: 195-196).

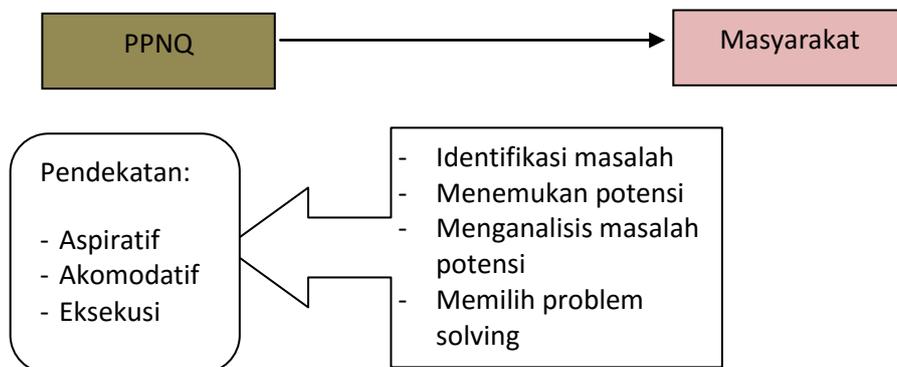
D. Model pemberdayaan PPNQ terhadap masyarakat

1. Model Pemberdayaan

Pondok Pesantren Nurul Qodim sebagai pondok pesantren yang peduli terhadap kepentingan masyarakat sekitar memiliki manajemen yang bagus dalam melaksanakan *planning* yang telah diagendakan bersama dengan masyarakat. Dalam melaksanakan setiap agenda, PPNQ membutuhkan strategi dan langkah-langkah yang akan diambil dan dijadikan sebagai model dalam pemberdayaan pesantren terhadap masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Gus Hadi sebagai ketua yayasan PPNQ yang berwenang dalam mengatur seluruh ritme kegiatan di pondok pesantren, mulai dari aspek pendidikan di pesantren dan di luar pesantren, dakwah Islamiyah dan aspek sosial kemasyarakatan, menggunakan beberapa langkah-langkah strategis, yaitu seperti yang tertera pada bagan di bawah ini (Dokumentasi PPNQ, 2010):

Langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan PPNQ



Dari paparan data di atas, maka model pemberdayaan PPNQ tersebut mengikuti model yang dikembangkan oleh Suhendra dengan menggunakan *Metode Partisipatory Assesment (MPA)*.

Sebenarnya metode ini oleh K. Suhendra dipakai untuk menganalisis peran birokrasi terhadap masyarakat, akan tetapi, karena yang dilakukan oleh Pesantren Nurul Qodim yang pada saat itu di pimpin oleh sosok kyai yang dikenal dengan sebutan kyai Mino sesuai dengan metode yang digagas oleh K. Suhendra, menurut hemat peneliti, maka langkah-langkah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pesantren Nurul Qodim dapat diistilahkan dengan menggunakan *Metode Partisipatory Assesment (MPA)*.

Menurut Suhendra, *Metoda Partisipatory Assesment (MPA)* terdiri atas empat langkah, yaitu: (Suhendra, 2006: 109-110)

Langkah pertama: Menemukan Masalah. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat

mengidentifikasi kondisi, situasi dan masalah sosial di sekitar masyarakat setempat. Adapun langkah pertama ini meliputi:

- a. Pemetaan wilayah dan akses kepemilikan;
- b. Klasifikasi kesejahteraan;
- c. Masalah individu, kelompok dan masyarakat yang dihadapi;
- d. Sejarah perkembangan wilayah;
- e. Observasi lapangan.

Langkah kedua: Menemukan Potensi. Potensi yang dimiliki masyarakat ini merupakan sistem sumber yang dapat dikelola secara optimal guna mengatasi permasalahan sosial maupun pengembangan masyarakat setempat. Potensi dapat berupa:

- a. Potensi rumah tangga setiap keluarga;
- b. Waktu-waktu yang dapat digunakan secara produktif;
- c. Sarana dan prasarana serta berbagai jenis pelayanan umum dari pemerintah, swasta maupun LSM;
- d. Sistem nilai masyarakat;
- e. Kebiasaan mengambil keputusan.

Langkah ketiga: Menganalisis Masalah dan Potensi. Mengkaji berbagai masalah, penyebab, hubungan causalitas, factor pendukung maupun penghambat. Kemudian mengkaji kemungkinan potensi yang ada untuk memecahkan masalah.

Langkah keempat: Memilih Solusi Pemecahan Masalah. Langkah ini merupakan upaya-upaya konkrit untuk memecahkan masalah berupa kegiatan:

- a. Mencegah timbulnya masalah lebih jauh;
- b. Memobilisasi sistem sumber dan potensi;
- c. Menentukan alternatif pemecahan masalah;
- d. Pertemuan masyarakat untuk menentukan skenario tindakan.

2. Pendekatan dan langkah-langkah pemberdayaan

Dalam melakukan langkah-langkah kegiatan pemberdayaan, PPNQ menggunakan beberapa pendekatan, yang peneliti klasifikasikan menjadi tiga pendekatan, yaitu:

a) Aspiratif

Pendekatan ini dilakukan oleh PPNQ untuk mendengar setiap keluhan problematik yang dihadapi oleh masyarakat. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi lebih jauh terhadap setiap persoalan yang sedang di alami oleh warga. Dengan mengetahui problematika warga, diharapkan pesantren dapat mencari jalan keluar yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

b) Akomodatif

PPNQ mampu mengakomodir setiap keluhan yang masuk ke pesantren dan menyediakan fasilitas atau sarana guna menjawab setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk *survive*.

c) Eksekusi

Setelah mendengar dan mengakomodir problematika masyarakat, maka PPNQ tidak hanya berhenti pada fase itu saja, akan tetapi PPNQ melakukan tindakan riil guna mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Model relasi yang dibangun antara Pesantren dan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, pesantren akan memiliki hubungan (relasi) dengan masyarakat yang lebih erat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti. Berdasarkan teori, relasi tersebut dapat disebut dengan hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan 'patronase' (*patronage*).

Istilah 'patron' berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 'seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh'. Sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau *extended family*. Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron. Hubungan patron-klien itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama ([http://www.Pemberdayaan/Mengenal Hubungan Patron-Klien](http://www.Pemberdayaan/Mengenal_Hubungan_Patron-Klien)).

Berdasarkan kenyataan ini, tepat kiranya jika peneliti mengatakan bahwa model hubungan semacam ini, peneliti sebut juga sebagai model hubungan '*induk semang-klien*', di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik. Hal ini karena pada umumnya, *induk semang* adalah orang atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat atau komunitas dalam hal ini adalah pesantren yang di dalamnya terdapat unsur kyai dan pengurus pesantren dan harus memberi perlindungan atau pengayoman semaksimal mungkin kepada *klien-kliennya* (santri dan masyarakat). Sedangkan sebaliknya, para klien harus membalas budi baik yang telah diberikan induk semang dan melakukan pembelaan terhadap pihak lain sebagai saingannya.

PENUTUP

Berdasarkan kenyataan ini, tepat kiranya jika peneliti mengatakan bahwa model hubungan semacam ini, peneliti sebut juga sebagai model hubungan '*induk semang-klien*', di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik. Hal ini karena pada umumnya, *induk semang* adalah orang atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat atau komunitas dalam hal ini adalah pesantren yang di dalamnya terdapat unsur kyai dan pengurus pesantren dan harus memberi perlindungan atau pengayoman semaksimal mungkin kepada *klien-kliennya* (santri dan masyarakat). Sedangkan sebaliknya, para klien harus membalas budi baik yang telah diberikan induk semang dan melakukan pembelaan terhadap pihak lain sebagai saingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. (2006). *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ali Imron dkk. (2003). *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- al-Jabiri, Muhammad Abid. (2000). *Post Tradisionalisme Islam*, ter. Ahmad Baso. LKiS, Yogyakarta.
- Bawani, Imam dkk. (2011). *Pesantren Buruh Pabrik, Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Bawani, Imam. (2011). *Pesantren Buruh Pabrik, Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren*. LKiS, Yogyakarta.
- Bruinessen, Martin Van. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Darmaningtyas, (2011). *Pendidikan Rusak-Rusakan*. LKiS, Yogyakarta.
- Dhofier, Zamakhsari. (1984). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Ditjen Kelembagaan Agama Islam

- Departemen Agama RI. (2004). *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Tahun 2004-2009*. Jakarta.
- Dokumentasi PPNQ Perencanaan Pemberdayaan. (2010)
- Gorton, Ricard A. (1977). *School Administration*. Dubuque Iowa, Wm. C. Brown Company Publishers.
- <http://www.Pemberdayaan/Mengenal Hubungan Patron-Klien> « Fahrudin HM Blog.htm, diakses pada tanggal 26 Juli 2012.
- http://www.gurutrenggalek.com/2010/09/relevansi-sistem-pendidikan-pesantren_19.html, diakses pada tanggal 01 Agustus 2012
- Madjid, Nurcholis. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- (1993). *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*. Mizan, Bandung.
- Maisyaroh (dalam Ali Imron, dkk). (2003). *Manajemen Pendidikan Malang*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Moleong. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Qomar, Mujamil. (2000). *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Siraj, Said Aqil. (1998). *Membangun Tradisionalitas Untuk Kemajuan*, Saifullah Ma'sum (ed.) dalam *Dinamika Pesantren*. Jakarta: Yayasan al-Hamidiyah.
- Sudarsono. (1992). *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sudjatmoko. (1987). *Masa Depan Manusia: Antara Transendensi dan Histori*, dalam Majalah Panji Masyarakat, No. 543, Jakarta: edisi 21 Juni.
- Suhendra, K. (2006). *Peran Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. (2003) "Pesantren di Tengah Arus Globalisasi" dalam A.Z Fanani & Elly el-Fajri (ed.), *Menggagas Pesantren Masa Depan; Geliat Suara Santri untuk Indonesia Baru*. Yogyakarta: Qirtas.
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS.
- (1981). *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lappenas.